

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya tidak ada penafsiran yang bersih akan kepentingan, tidak ada tafsiran yang objektif dan murni atau orisinal, dikarenakan terdapat bagian kepentingan laten dan subjektivitas penulisnya. Setiap pembaca tafsir seharusnya bersifat kritis terhadap pembacaan karya tafsir. Serta, kepentingan politis ialah diantara bentuk pembacaan Al-Qur'an¹. Hal tersebut ialah konsekuensi logis pada Al-Qur'an sebagai kitab terbuka, sehingga siapapun dan dengan bentuk apapun dapat mendekati dengan Al-Qur'an, seperti pada kepentingan politik. Karya tafsir Kolonel Bakri Syahid pada Tafsir *Al-Qur'an Basa Jawi* yakni *Al-Huda* juga termasuk dalam menunjang arah politik tertentu.

Oleh karena itu suatu penafsiran memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tafsir sebagai ijtihad bahkan produk pemikiran manusia tidak lepas dari bentuk penyimpangan penafsiran. Bentuk penyimpangan itu disebut dengan *Al dakhil*. *Al dakhil* adalah suatu usaha atau metode menemukan kesalahan dan dengan cara mengamati, membandingkan, mempelajari, memilih, mengevaluasi, dan mengevaluasi hasil penafsiran berbagai bentuk pola dan apa yang melatarbelakanginya². Kritik *al dakhil fit tafsir* diperlukan dalam mengevaluasi keanekaragaman penafsiran yang sudah berkembang sampai saat ini. Sebagai naluri manusiawi, seringkali kita hanya tertarik dan tergelitik oleh kelebihan sesuatu, tetapi tidak menyadari kekurangan dan perbedaan di dalamnya. Oleh karena itu, sebagai makhluk Tuhan yang cerdas, ada baiknya untuk selalu berusaha melihat kekurangan sekaligus kelebihan dari sesuatu.

¹Stefan Wild, "Political Interpretation of the Qur'an", dalam Jane Dammen McAuliffe (ed), *the Cambridge Companion to the Qur'an* (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), h. 273-289.

² Ibrahim Syuaib. *Metode Kritik Tafsir (Ad Dakhil fi al-tafsir)*. Fakultas Ushuluddin UIN Bandung. 2008

Dimulainya politik dalam sejarah Islam terjadi pada masa pembentukan Negara Madinah oleh Rasulullah saw³. Penciptaan suatu sistem sosial-politik di Negara Madinah merupakan bentuk praktik politik yang dilakukan pada zaman Nabi Muhammad Saw. Pembuatan dasar Negara atau yang disebut dengan piagam Madinah merupakan hal yang pertama dilakukan oleh Nabi pada tahun pertama Hijriah. Isi dari piagam Madinah ialah aturan-aturan, hukum, dan hubungan dari banyaknya golongan di dalam masyarakat Madinah yang memiliki sifat majemuk. Kepala Negara di Negara Madinah di pimpin oleh Nabi Muhammad Saw dan konstitusinya ialah Piagam Madinah.

Nabi Muhammad dalam mengimplementasikan persoalan politik dan pemerintahan, tidak memberikan ketentuan atau hukum-hukum yang bersifat mutlak yang harus masyarakat Madinah ikuti. Pelaksanaan prinsip-prinsip dasar merupakan hal utama yang Nabi Muhammad lakukan, sedangkan hukum-hukum maupun aturan yang bersifat normative, serta hal lain yang memiliki sifat teknis diberikan masyarakat Madinah. Masyarakatlah yang menyusun hal demikian menyesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan yang masyarakat hadapi. Sehingga, hal inilah yang menjadi sebab Nabi Muhammad Saw tidak secara tegas menunjuk siapa pengganti beliau setelah meninggal dunia, dikarenakan salah satu dari sifat teknis ialah yang berkaitan dengan permasalahan kepemimpinan.⁴

Konsep kenegaraan yang ada semasa Nabi Muhammad Saw berlandaskan dan berpedoman pada Al-Qur'an serta Hadist. Pada masa itu pemerintahan Rasulullah dan *al Khulafaur al Rasyidun* mengimplementasikan konsep kenegaraanya pada pelaksanaan politik di Madinah. Landasan dan pedoman yang terdapat didalam Al-Qur'an dilaksanakan bagi semua umat manusia dan tidak bagi umat muslim saja, hal tersebut juga digunakan untuk membedakan antara *haq* dan *bathil*, Allah SWT bersabda dalam Al-Qur'an:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ

“Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil).”⁵

³Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group.2018), h. 35-50

⁴Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group.2018), h. 35-50

⁵Q.S. Al Baqarah.2:185

Al-Qur'an merupakan kitab suci bagi pemeluk agama Islam yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW. Kitab suci ini berisikan beberapa surat dan dalam suratnya berisikan beberapa ayat. Umat muslim sangat mempercayai bahwasannya Al-Qur'an diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dengan cara berangsur selama 22 tahun 2 bulan dan 22 hari, dari tanggal 17 Ramadhan saat Rasulullah SAW berusia 40 tahun hingga beliau tutup usia pada tahun 632 H. Di dalam kitab suci Al-Qur'an berisikan petunjuk untuk menjalani kehidupan ilahiyah ataupun insaniyah, hukum dan ajaran-ajaran lain menurut agama Islam serta kisah dari umat terdahulu.⁶

Kajian Studi Al-Qur'an semakin hari semakin berkembang pula menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan menyesuaikan dengan permasalahan dan urusan yang sedang dihadapi oleh manusia. Alquran memiliki otoritas tertinggi untuk menafsirkan dirinya sendiri sebagai sumber pertama dan utama dalam penafsiran. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taymiyah bahwa menafsirkan Alquran dengan Alquran merupakan metode terbaik.⁷

Ali bin Abi Thalib mengatakan terkait dengan tafsir pada Al-Qur'an, yakni: "mushaf yang tidak bisa bicara merupakan makna dari Al-Qur'an, manusialah yang menuturkan serta mengucapkannya"⁸. Dikarenakan penafsiran sangat bergantung pada latar belakang dan tujuannya, itu yang menjadikan banyak perbedaan antara suatu Tafsiran dengan Tafsiran yang lainnya. Pendapat dari M. Quraish Shihab mengatakan bahwa hasil pemikiran yang berbeda-beda diakibatkan karena adanya pengaruh disiplin ilmu, tingkat kecerdasan, ditemukannya ilmiah, pengalaman, kondisi sosial, politik, dan lain sebagainya⁹. Akan tetapi, seluruh penafsiran yang telah dibuat harus dihargai dan tidak secara langsung ditolak, selagi pembuatan tafsir dilakukan dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab.

Penafsiran sebagai produk dapat diartikan sebagai proses yang tidak mengenal kata akhir. Artinya para mufasir harus terus memaknai sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan zaman. Al-Qur'an tidak pernah kehilangan relevansinya dengan perkembangan zaman yang semakin cepat. Dan proses ini melahirkan pola penafsiran yang berbeda, yang

⁶M. Quraish Shihab, *Sejarah dan Ulum al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001) 14.

⁷Muhammad Ulinuha, *Metode Kritik Al-Dakhl fit Tafsir: Cara Mendeteksi Adanya Infiltrasi dan Kontaminasi Dalam Penafsiran al-Qur'an* (Jakarta: PT Qaf Media Kreativa 2019), 81.

⁸Nasr Hamid Abu Zayd, *Teks, Otoritas, Kebenaran* (Yogyakarta: LKiS, 2003), h. 159.

⁹M. Quraish Shihab, "Membumikan" *al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1425 H/2004 M),h. 77.

menjadi khazanah keilmuan dunia intelektual. Tafsir adalah hasil ijtihad untuk menerjemahkan pesan Tuhan kepada manusia.¹⁰ Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa ada banyak bentuk kepentingan non-objektif dalam penafsiran dan penciptaan penafsir.

Pada abad ke 19¹¹, penulisan dan penerbitan telah dilakukan pada Tafsir Al-Quran dengan bahasa Jawa oleh Muhammad Solih Umar as-Samarani atau yang biasa disebut Kiai Soleh, beliau telah melakukan penulisan pada kitab tafsir *Faid ar-Rahman fi Tarjamah Kalam Malik ad Dayyan* (1820-1903). Kemudian di abad ke-20, tafsir yang ditulis oleh KH. Misbah Zainul Mustofa Bangilan pada kitab tafsir *al-ikli fi Ma'ani al-Tanzil* (1916-1994) serta penulisan tafsir oleh KH. Bisri Mustofa Rembang pada kitab tafsir *al-Ibriz li Ma'rifati Tafsir al-Quran al-Aziz* (1915-1977) juga penggunaannya dalam berbahasa Jawa dengan aksara pegon. Selain itu, penulisan tafsir dengan bahasa Jawa juga ada yang menggunakan aksara latin, hal itu telah dilakukan oleh KH. Muhammad Adnan pada kitab Tafsir *Al-Qur'an Jawi* (1889-1969), Moenawar Chalil pada Tafsir *Al-Qur'an Hidajatur Rohman* (1909-1961), Bakri Syahid pada kitab Tafsir *al-Huda Tafsir Basa Jawi* (1918-1994), Ahmad Djawahir Anomwidjaja dalam tafsir *Sekar Sari Kidung Rahayu Sekar Macapat Terjemahanipun Juz Amma* (1992).¹²

Kitab Tafsir bahasa Jawa *Al-Huda* juga ikut menyemarakkan berkembangnya khazanah tafsir pada periode modern ini. Ciri unik yang ada pada tafsir *Al-Huda* menjadi pembeda dengan kitab tafsir lain, dimana penulisan kitab ini menggunakan cara dengan menyalin ayat yang berbahsa Arab dalam Al-Qur'an, kemudian dilakukan penulisan ulang dengan huruf latin lalu diterjemahkan bahasa Jawa Kromo, penulisan tafsirnya pun dilakukan dalam bentuk *footnote* yang terletak dibagian bawah redaksi ayat. Upaya yang dilakukan oleh Bakri Syahid sangat membantu memudahkan masyarakat untuk mendalami dan memahami Al-Qur'an, namun tidak mengerti akan bahasa Indonesia maupun bahasa Arab serta sulit dalam membaca aksara pegon.

¹⁰MK. Ridwan, "Tradisi Kritik Tafsir: Diskursus Kritisisme Penafsiran dalam Wacana Qur'anic Studies", *Jurnal Theologia*, Vol. 28, No. 1, (Juni 2017), 64.

¹¹Imam Muhsin, *Tafsir Alquran dan Budaya Lokal, Studi Nilai-Nilai Budaya Jawa dalam Tafsir alHuda Karya Bakri Syahid* Balitbang dan Diklat Kementerian Agama RI,2010, hm 17.

¹²Imam Muhsin, *Tafsir Alquran dan Budaya Lokal, Studi Nilai-Nilai Budaya Jawa dalam Tafsir alHuda Karya Bakri Syahid* Balitbang dan Diklat Kementerian Agama RI,2010, hm 17.

Bahasa ialah satu dari banyaknya unsur yang telah menyatu pada kebudayaan masyarakat, hal tersebut ialah satu kepaduan yang tidak bisa terpisahkan.¹³Bahasa ialah suatu elemen terpenting dalam kesatuan dunia, dengan demikian jika berkata akan bahasa, maka tidak terlepas dari realitas serta budaya dari penggunaan bahasa oleh masyarakat tersebut.¹⁴

Al-Huda bersampul merah. Ada yang hijau. Berjumlah 1376 halaman. Dua sampul yang berbeda warna itu tidak memberikan perbedaan apapun. Hanya beda kofer saja. Cukup tebal untuk karya tafsir yang dicetak satu jilid. Kain merah-putih menjadi pita pembatas halaman, yang melambangkan bendera Indonesia. Karya berukuran 15 x 23 cm¹⁵ ini tidak langsung diterbitkan, melainkan ditashih dahulu oleh Tim Depag RI; HM. Shawabi Ihsan (Ketua), A. Badri Yunardi (Sekretaris), dan anggota KH. Syukri Ghazali, KH. A. Zaini Miftah, KH. Iskandar Idris, KH. Mukhtar Luthfi al-Anshari, H. Ubaidillah al-Sari, H. Muhammad al-Sari dan H. ‘Abdullah, dengan bukti Surat Tanda Tashih No. J-III/206/B-II/77 tertanggal Jakarta, 20 Agustus 1977 M¹⁶.

Kultur Jawa ialah satu dari banyaknya kultur, dimana dalam berbahasanya tidak bisa terpisahkan dari suatu budayanya. Dalam Bahasa Jawa juga sangat berkaitan dengan arti-arti simbolik yang ada pada nilai-nilai berbudaya di masyarakat Jawa. Penggunaan bahasa Jawa juga dikenal dengan susunan system yang kaitannya dengan perbedaan jabatan, usia, maupun tingkat keakraban antar manusia.

Seorang Mufasir yang berhubungan dekat dengan sekitar kekuasaannya, maka hasil karya tafsirnya semakin *pro status quo*.¹⁷ Banyaknya agenda kekuasaan, menjadikannya melakukan pencarian pembenaran melalui tasfir pada ayat-ayat Al-Qur’an. Terjadinya hal tersebut dikarenakan terdapat kerja sama diantara kepentingan laten penafsir dengan kemujmalan ayat. Penelitian ini memastikan pandangan yang menunjukkan terdapat penyimpangan dalam ayat-ayat Al-Qur’an.

Hal yang ditunjukkan dalam penelitian ini ialah penyimpangan dalam menggunakan ayat, yang benar terjadi pada tafsir lokal *Al-Huda* yang ditulis oleh Kolonel Bakri Syahid yakni Tafsir *Al-Qur'an Basa Jawi* (1979). Karakteristik dari ayat Al-Qur'an

¹³Imam Muhsin, *Tafsir Alquran dan Budaya Lokal, Studi Nilai-Nilai Budaya Jawa dalam Tafsir alHuda Karya Bakri Syahid* Balitbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010, hm 20.

¹⁴Nash Hamid Abu Zaid, *Tekstualitas Alquran terj. Khoiron Nahdhiyyin* .Yogyakarta: Lkis, 2013, hlm. 2.

¹⁵Keterangan dalam Surat Tanda Tashih. Bakri Syahid, *al-Huda: Tafsir Qur'an Basa Jawa*, h.4.

¹⁶Bakri Syahid, *al-Huda: Tafsir Qur'an Basa Jawi*, h. 4.

¹⁷Nurul Huda Maarif. *Penafsiran Politik Kolonel Bakri Syahid dalam kitab tafsir Al-Huda*. Jurnal Islam Nusantara. Vol II. 2021. hlm 70

yang longgar dilakukan penarikan paksa guna memberikan dukungan terhadap rezim penguasa, dengan tidak melihat konteks asli pembicaraan ayat atau latar turunnya. Penggunaan ayat-ayat tertentu dalam penafsir militer dilakukan untuk memvalidasi kebijakan Orde Baru. Seperti pada tafsirannya yang mendukung suatu negara religius yang tidak negara agama serta tidak negara sekuler, negara Demokrasi Pancasila, ketahanan dan pembangunan nasional, ideologi, militer, dan ibadah politik. Dengan demikian, metode penelitian berupa deskriptif analitis ini, dapat memberikan bukti bahwa terdapat corak baru dalam tafsirannya, yaitu *al-lawan al-siyasi* (corak politik)¹⁸, tidak sedikit dari pengkaji Al-Qur'an lain yang tidak menjelaskan dengan spesifik dan serius.

Contohnya ketika Bakri Syahid mengkritik tentang konsep negara Sekuler dalam menafsirkan QS. Yunus ayat 07. Menurutnya, kecintaan pada duniawi secara berlebihan akan menghadirkan *secularism*, yang tidak sesuai cita-cita pemerintah Indonesia. Menafsiri Qs. Yunus [10]: 7, tentang orang-orang yang tidak mengharap pertemuan dengan Allah Swt dan lebih memilih kehidupan dunia, ia menuliskan, faham sekuler bertentangan dengan Islam dan tidak mungkin diterapkan di Negeri Pancasila Indonesia, sebab telah ditetapkan dalam UUD 1957, pada Bab XI, Pasal 29, bahwa “Negara berdasar atas ke-Tuhan-an Yang Maha Esa”.

Masyarakat yang diidamkan adalah sosialis-religijs, yakni masyarakat adil dan makmur secara material-spiritual, lahir-batin, dunia-akhirat, yang diridhai Allah Swt. Menurutnya, secara politis-sosiologis, Indonesia adalah negara Kesatuan dan Negara Hukum, serta Negara ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan negara ateis atau sekularis dan bukan negara Islam, melainkan negara yang masyarakatnya 90 % memeluk Islam¹⁹.

Cara menjelaskan ayat dengan mengaitkan negara sosialis-religijs, ini berbeda dengan Tim Penafsir UUI, yang menuliskan bahwa melalui ayat ini Allah Swt tengah menerangkan balasan bagi orang-orang yang mengingkari bukti-bukti kebenaran dan keadaan orang-orang beriman lagi mengerjakan amal saleh²⁰. Ayat ini menerangkan orang yang mengingkari pertemuan dengan Allah Swt dan tidak mempercayai pengadilan akhirat, karena mereka lebih mencintai dunia, sehingga rela menukar akhirat dengan dunia. Mereka tergoda fatamurgana kelezatan duniawi. Mereka tidak mengindahkan al-

¹⁸Nurul Huda Maarif. *Penafsiran Politik Kolonel Bakri Syahid dalam kitab tafsir Al-Huda*. Jurnal Islam Nusantara. Vol II. 2021. hlm 69

¹⁹Bakri Syahid, *al-Huda: Tafsir Qur'an Basa Jawi*, h. 364

²⁰Tim Penafsir UUI, *al-Qur'an dan Tafsirnya* (Yogyakarta: UUI Press, T.Th.), IV/318.

Qur'an, memahami dan mengamalkannya. Tempat yang tepat bagi mereka adalah neraka²¹.

Berdasar dari paparan latar belakang, tujuan dari peneliti dengan adanya penelitian ini ialah untuk mengetahui *Al-Dakhil fi al-Ra'yi* dalam Tafsir Al-Huda mengenai ayat tentang Kenegaraan dan bagaimana Pemikiran Bakri Syahid mengenai Konsep Kenegaraan. Dengan demikian, judul dari penelitian Skripsi oleh penulis ialah ***Al-Dakhil fi al-Ra'yi* dalam Tafsir Al-Huda karya Brigjend (Purn.) Drs. H. Bakri Syahid (Kajian terhadap penafsiran ayat-ayat tentang Kenegaraan)**

B. Rumusan Masalah

Berikut permasalahan utama yang telah dirinci menjadi dua bagian, yakni:

1. Bagaimana Penafsiran ayat-ayat tentang Konsep Kenegaraan yang terkandung dalam Tafsir *Al-Huda*?
2. Bagaimana implikasi *al-Dakhil* dalam penafsiran ayat-ayat tentang Konsep Kenegaraan yang terdapat dalam Tafsir *Al-Huda* ?

C. Tujuan Penelitian

Meninjau dari permasalahan tersebut, Berikut tujuan peneliti dalam melakukan penelitian:

1. Untuk mendeskripsikan penafsiran ayat tentang Konsep Kenegaraan dalam kitab Tafsir *Al-Huda*.
2. Untuk mengetahui implikasi *al-Dakhil* dalam penafsiran ayat-ayat tentang Konsep Kenegaraan yang terdapat dalam Tafsir *Al-Huda*.

D. Manfaat Penelitian

Berikut manfaat dilakukannya penelitian ini:

1. Secara teoritis, bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi perkembangan keilmuan Islam serta Ilmu Kepenulisan, seputar bahasan tentang Konsep Kenegaraan dalam perspektif Tafsir *Al-Huda* sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan serta keimanan. Harapan terhadap penelitian serupa selanjutnya agar digunakan sebagai sumber informasi pendahuluan dan bisa menjadi referensi

²¹Tim Penafsir UII, *al-Qur'an Tafsirnya*, IV/318

komparasi bagi penelitian yang sejenis akan tetapi dengan sudut pandang yang berbeda, serta dapat menjadi literatur di perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang berkenaan dengan pembahasan seputar ilmu tafsir.

2. Secara praktis, harapan dari terselesainya penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman dari pembahasan mengenai *al-Dakhil fit Tafsir* dalam ayat-ayat tentang Konsep Kenegaraan kepada Masyarakat luas.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini tinjauan pustaka ditujukan guna mengetahui keotentikan penelitian yang akan dilaksanakan dan untuk menginformasikan bahwa tulisan ini tidak mengikuti dan menulis ulang dari penelitian yang telah dilakukan. Maksud dari hal ini ialah sebagai satu keperluan ilmiah yang berfungsi untuk menyampaikan kejelasan mengenai penggunaan referensi melalui aset pustaka yang relevan dan dapat memperoleh beberapa data yang berhubungan dengan tema penulisan.

Penelitian mengenai penulisan karya tafsir oleh Musafir Indonesia telah banyak dilakukan. Akan tetapi, objek penelitian berupa karya dari Bakri Syahid yakni tafsir *Al-Huda* tidak banyak peneliti yang melakukan penelitian secara intensif. Walaupun terdapat beberapa skripsi, jurnal, ataupun buku yang telah mengulas mengenai kitab tafsir *Al-Huda*.

Epistemologi Tafsir Yasin karya Hamami Zadah, karya Alfi Nur Diana. Skripsi pada jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019. Skripsi ini membahas epistemologi penafsiran Hamami Zadah dalam kitab tafsir surat yasin, memaparkan metodologi serta validitas penafsiran Hamami zadah dalam tafsir surat yasin. Namun dalam skripsi ini terdapat celah yang harus diteliti dan dibuktikan secara ilmiah mengenai kevalidan kitab tafsir Hamami Zadah. Masih ditemukan beberapa penyimpangan penafsiran dan adanya hadis daif yang digunakan sebagai sumber penafsiran Hamami Zadah.

Al-Dakhil dalam Tafsir (studi atas penafsiran esoterik ayat-ayat imamah husain al-tabataba'i dalam tafsir al-mizan). Siar Ni'mah. 2019-01-15Ni'mah, S. (2019). *Al-Dakhil dalam Tafsir. KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin*, 9(1), 44-66. Dalam penelitian ini hanya sebatas tentang ayat-ayat imamah yang dibahas mengenai al-Dkahil berbebda dengan penelitian ini yang terfokus dalam satu juz'amma saja masih belum terfokus dalam ayat-ayat juz 'amma dan terfokus ayat tertentu.

Skripsi yang ditulis oleh Abdul Rahman Taufiq di tahun 2017 dengan judul Studi Metode dan Corak *Tafsir Al-Huda: Kitab Tafsir Bahasa Jawi* karya Brigjend (purn) Drs. H. Bakri Syahid. Pembahasan dari skripsi ini ialah mengenai Corak dan Metode dari kitab tafsir *Al-Huda*. juga terdapat biografi pengarangnya yaitu Brigjend (purn) Drs. H. Bakri Syahid, selain itu dibahas pula mengenai sejarah penulisannya dan isi dari kitab tafsir tersebut yang memuat banyak Konsep Kenegaraan berdasarkan Al-Qur'an

Nurul Huda Maarif dalam Jurnal Islam Nusantara yang ditulis pada tahun 2021. Penulis dalam artikel ini menyatakan bahwa terdapat penulisan karya tafsir dengan corak politik; yang berisikan perkembangan isu-isu politik kenegaraan yang terjadi ketika penulisan karya ini. Hal tersebut sangat berbeda dari perkembangan corak tafsiran yang umum di masyarakat, yakni: corak filsafat, tasawuf, nahwu, bahasa, fikih, dan lainnya. Pengkajian secara serius dan spesifik pada corak politik atau *al-lawan alsiyasi* relatif tidak banyak dilakukan.

Nurul Huda dalam Disertasi dengan judul Penafsiran politik Kolonel Bakri Syahid dalam Tafsir *al-Huda*, ialah suatu penelitian yang khusus dilakukan pada tafsir *Al-Huda* yang didalamnya terdapat elemen-elemen Politik dengan menghubungkan sikap politik Bakri Syahid terhadap latar belakangnya yang memiliki keahlian dibidang militer sampai berada di kursi pemerintahan. Pengungkapan nilai-nilai politik yang ditemukan pada penelitian ini termasuk dari nilai-nilai mengenai kenegaraan dan kebangsaan, secara spesifik berada dala ruang lingkup Indonesia.

Berdasar dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, banyak ditemukannya penelitian serta pembahasan yang berkaitan dengan kitab karya Bakri Syahid yakni tafsir *Al-Huda* yang lebih meneliti tentang pandangan dari Bakri Syahid mengenai suatu Objek tertentudan yang membedakan penelitian ini dari yang lainnya ialah dalam penelitian ini hal utama yang di kaji adalah *Al-Dakhil fi al-Ra'yidari* ayat-ayat tentang konsep Kenegaraan.

F. Kerangka Berpikir

Ibn Manzur dalam kitabnya menjelaskan secara etimologi, *al-Dakhil* berasal dari kata *dakhala* yang artinya semua unsur eksternal yang masuk ke dalam diri manusia, dapat merusak akal, mental juga fisik²². Al-Raghib al-Asfahani (w.502 H/1108 M)²³ kemudian

²²Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab*, juz 11, (Beirut: Dar al-Sadr, 1956), 241

²³<https://tafsiralquran.id/al-raghib-al-asfahani-w-502-h-dan-kontribusinya-di-bidang-kajian-al-quran/>

menganalogikan makna *al-Dakhil* dengan seekor burung, hal ini karena kebiasaan seekor burung adalah terbang dan menyelinap masuk di antara pepohonan²⁴.

Berdasarkan pemaparan definisi secara etimologi di atas, dapat disimpulkan bahwa istilah *al-Dakhil* memiliki makna yang hampir sama, yakni merusak, penyakit, aib, cacat, keraguan²⁵. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *al-Dakhil* adalah penambahan hal yang dapat merusak, yakni penambahan yang tidak memiliki dasar, data, dan sumber yang valid.

Dalam konteks *dakhiil* ini, Dr. Ahmed Syahaat Ahmed Moosa secara eksplisit membagi *dakhiil* dalam dua kategori²⁶. *Dakhiil bil Ma'tsur*; yaitu apa-apa yang diriwayatkan dalam tafsir Al-Qur'an oleh sahabat dengan mengambil dari ahli kitab yang dikenal sebagai kisah Israiliyyat dan tidak ditemukan dalam agama kita apa-apa yang membenarkannya. *Dakhiil bil Ra'yi*; yaitu *dakhiil* yang muncul dalam kitab tafsir disebabkan karena disandarkan pada pemikiran yang timbul tanpa didukung metodologi penafsiran yang telah diakui kevalidannya oleh para ulama baik klasik maupun kontemporer²⁷.

Teori *al-Dakhil* selalu diiringi dengan masalah *al-Asli* dalam tafsir, karena *al-Asli* termasuk perantara untuk mengetahui dan mengukur tingkat objektivitas penafsiran, sebelum mengalami kerusakan yang disebabkan oleh *al-Dakhil*. Dalam konteks ini menurut Abd al-Wahhab 'Abd al-Wahhab Fayed, *al-Asli* lawan kata dari *al-Dakhil*. *Al-Asli* berasal dari Bahasa Arab *al-asli* yang berarti asal, dasar, valid, sumber dan pokok. Secara Bahasa adalah segala sesuatu yang memiliki asal-usul yang jelas dan pasti, autentik, orisinal, dan valid²⁸.

Kehadiran Al-Quran tidak terlepas dari sistem sosial politik masyarakat Quraisy Makkah yang despotik dan eksploitatif. Dalam bukunya, *Major Themes of the Qur'an*, Fazlur Rahman (1919-1988), tokoh neo-modernis Islam asal Pakistan, mengatakan bahwa sejak periode awal, Al-Quran sudah menegaskan cita-citanya untuk menegakkan sebuah masyarakat yang etis, demokratis, dan egaliter.²⁹

²⁴Al-Asfahani Al Raghbi, *Mufradat Alfaz al-Qur'an*, (Mesir: Dar al-Saqafah al-'Arabiyyah, 1996), 166

²⁵Muhammad Ulinuha, *Metode Kritik Al-Dakhil fit-Tafsir*, hlm 25

²⁶Ahmed Moosa, Dr. Ahmed Syahaat, *Ad dakhiil fii At Tafsir*, Kairo, hlm 35

²⁷Ahmed Moosa, Dr. Ahmed Syahaat, *Ad dakhiil fii At Tafsir*, Kairo, hlm 36

²⁸Muhammad Ulinuha, *Metode Kritik Al-Dakhil fit-Tafsir*, hlm 46

²⁹Tijani Abdul Qadir Hamid. *Pemikiran Politik Dalam Al-Qur'an*. Gema Insani Press. Jakarta. 2001. Hlm 56

Dalam persoalan Kenegaraan, landasan yang terdapat pada Al-Qur'an dilaksanakan khususnya oleh umat muslim serta pada umumnya oleh seluruh manusia. Terdapat beberapa ayat yang ada kaitannya dengan persoalan politik yang bersifat umum sehingga perlu dilakukan penafsiran guna memperoleh landasan Kenegaraan dan prinsip politik yang harus umat muslim laksanakan. Banyak orang yang mengemukakan bahwa di dalam Al-Qur'an tidak sedikit termuat ajaran yang lengkap, ajarannya memuat semua persoalan yang terjadi di kehidupan termasuk masalah Politik dan Kenegaraan. Namun yang perlu dicatat adalah, ajaran yang terkandung dalam Al-Quran bersifat Umum dan Universal³⁰. Perlu adanya upaya Interpretasi dan Ijtihad dari para Ulama dalam membicarakan masalah Kenegaraan.

Didalam Al-Qur'an tidak memberikan secara langsung konsep mengenai Negara, Islam tidak memberikan secara detail dan rinci bagaimana kaum muslimin untuk menjalankan dan mengurus suatu Negara. Hal demikian yang menjadi dasar harus adanya Ijtihad politik dalam setiap umat muslim. Dan dalam melakukan Ijtihad harus berdasarkan pada Al-Qur'an, Hadist, serta Sejarah Islam terdahulu³¹.

Terdapat lima konsep negara dalam sejarah Islam³². *Pertama*, konsep teokratis. Menurut teori, negara teokrasi adalah sebuah negara yang kedaulatannya ada pada Tuhan. Konsep teokratis pada negara Islam muncul di era paling awal sejarah Islam, yakni pada masa nabi Muhammad SAW. Sebagaimana diketahui, dalam mengelola negara dan masyarakat, nabi senantiasa berdasarkan pada tuntunan dan bimbingan wahyu dari Allah SWT.

Kedua, konsep republik. Ketika nabi wafat, dan urusan pemerintahan beralih ke tangan Khulafaur Rasyidin, terjadi perubahan-perubahan mendasar dalam pengelolaan pemerintahan Islam. Konsep teokrasi yang pernah dijalankan nabi Muhammad digantikan dengan bentuk republik. Bentuk republik ini dijalankan karena para Khalifah bukan lagi orang-orang yang menerima wahyu, layaknya para rasul, meskipun para Khalifah tetap tunduk pada prinsip-prinsip dasar yang digariskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah³³.

Ketiga, konsep monarki. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat, yang menandai berakhirnya era kekalifahan, bentuk negara dalam Islam berubah dari republik ke monarki (kerajaan). Muawiyah –pionir berdirinya kerajaan bani Umayyah- adalah pemimpin Islam

³⁰Abu Zayd, Nasr Hamid. *Teks, Otoritas, Kebenaran*. Yogyakarta: LKiS, 2003.

³¹Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta: UI Press, 1990)

³²Musdah Mulia, *Negara Islam, Pemikiran Politik Husain Haikal* Jakarta: Paramadina, 2001.

³³Musdah Mulia, *Negara Islam, Pemikiran Politik Husain Haikal* Jakarta: Paramadina, 2001. Hlm 67

pertama yang mengubah bentuk pemerintahan tersebut. Sesuai dengan bentuk monarki, kepala negara bersifat absolut, kekuasaan terjadi secara turun temurun, dan musyawarah kurang dilaksanakan. Bentuk monarki ini dilestarikan oleh Dinasti Abbasiyah yang datang kemudian.

Keempat, konsep monarki konstitusional. Masuknya pengaruh Barat pada abad ke 19 ke dunia Islam dalam bidang politik, membuat para pemikir Islam mulai membuka wacana baru, terutama dalam paham konstitusi dan republik. Sebagai akibatnya kemudian muncul gerakan konstitusionalisme dalam gerakan Islam. Di antara para pemikir tersebut terdapat nama Rifa'ah Badawi, Jamaludin Al-Afghani dan Khayr Al-Din At-Tunisi³⁴.

Dari para pemikir-pemikir tersebutlah kemudian disusunlah konstitusi pertama di dunia Islam yang diumumkan di Tunisia pada tahun 1861, menyusul kemudian di Turki pada tahun 1876. Pada pertengahan abad ke 20 boleh dibilang hampir seluruh dunia Islam sudah mempunyai konstitusi³⁵.

Kelima, konsep republik. Masih di abad ke 20, perubahan penting terjadi pula ketika Musthafa Kemal Attaturk (1881-1938) menghapus dinasti Turki Utsmani dan melahirkan Republik Turki pada tahun 1923, dan pada tahun 1924, Turki kemudian berubah menjadi republik murni. Berakhirnya sistem monarki dari Turki memancing antusiasme para pemikir Muslim untuk mulai membicarakan konsep negara Islam secara lebih serius, terstruktur dan sistematis.

Pada tahun 1997 telah diterbitkan kitab tafsir oleh Brigjend (Purn.) Drs. H. Bakri Syahid³⁶. Yang menarik disini adalah beliau merupakan seorang yang berlatar belakang Militer namun mampu membuat sebuah kitab Tafsir bahasa Jawi yang berjudul *Al-Huda*. Sebagai upaya untuk memahami Al-Qur'an dalam kehidupan Masyarakat, Unsur yang terkandung dalam tafsir *Al-Huda* ialah unsur lokalitas, dimana masyarakat dapat dengan mudah memahami penyampaian pesan-pesan dari tafsir tersebut. Dan juga pada tafsir tersebut banyak mengandung pandangan-pandangan tentang kenegaraan dan politik yang dilihat berdasarkan realita di kehidupan Masyarakat Indonesia pada saat ini.

Dalam kitab tafsir *Al-Huda*, Bakri Syahid banyak menafsirkan ayat ayat Al-Qur'an yang kemudian beliau relevansikan dengan Politik dan Konsep kenegaraan³⁷. Bakri

³⁴Musdah Mulia, *Negara Islam, Pemikiran Politik Husain Haikal* Jakarta: Paramadina, 2001. Hlm 68

³⁵Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta: UI Press, 1990)

³⁶Dani Habibi. "Mengenal Tafsir Jawa *Al-Huda* karya Bakri Syahid". https://artikula.id/m_dhany_habibie/mengenal-tafsir-jawa-al-huda-karya-bakri-syahid/. 2019

³⁷Nurul Huda Maarif. *Penafsiran Politik Kolonel Bakri Syahid dalam kitab tafsir Al-Huda*. Jurnal Islam Nusantara. Vol II. 2021. hlm 81

menilai Negara Demokrasi Pancasila sejalan dengan Al-Qur'an dalam menafsiri Qs. Al-Mu'minin ayat 11, Bahasa pembangunan dan ketahanan nasional banyak ditemukan dalam *al-Huda*.

Bagi Bakri, landasan pembangunan bangsa adalah ajaran agama yang ditunjang program-program Pemerintah dalam Menafsiri Qs. al-Baqarah ayat 13, pada ayat lain Bakri Syahid menilai tujuan pembangunan adalah menghadirkan masyarakat adil dan makmur dalam Menjelaskan Qs. al-Nisa' ayat 59, Bakri juga mengkritik konsep negara Sekuler dalam menafsirkan Qs. Yunus ayat 7 dan Qs. Al-Mu'minin ayat 111³⁸, dalam hal Politik Bakri menafsirkan Qs. Ash-Shura ayat 38 tentang mengelola keperluan masyarakat, dan masih banyak lagi ayat-ayat terkait Politik dan Konsep kenegaraan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

Konsep Demokrasi kerakyatan merupakan hal yang paling banyak dibicarakan pada penafsirannya³⁹, tidak hanya itu, Bakri Syahid juga menambahkan relevansi ayat-ayat dengan kehidupan sosial masyarakat di Indonesia pada saat itu sekitar tahun 1980 an. Jadi wajar saja jika banyak yang mengkritisi tafsir ini sebagai tafsir yang menggiring masyarakat untuk pro terhadap kebijakan-kebijakan dari rezim Orde Baru.

G. Metodologi Penelitian



1. Jenis Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dimana jenis penelitian ini merupakan suatu upaya dalam melakukan penelitian yang melahirkan bahan informasi deskriptif yakni berbentuk bahasa tertulis dan kata-kata dengan penggunaan berbagai metode alamiah, penggunaan penelitian jenis ini juga dilakukan untuk meneliti kondisi Objek yang Ilmiah untuk mendapatkan data yang mendalam⁴⁰.

2. Sumber Data

Sumber penelitian berasal dari kedua sumber data, yakni:

a. Data Primer

³⁸Nurul Huda Maarif. *Penafsiran Politik Kolonel Bakri Syahid dalam kitab tafsir Al-Huda*. Jurnal Islam Nusantara. Vol II. 2021. hlm 83

³⁹Dani Habibi. "Mengenal Tafsir Jawa Al-Huda karya Bakri Syahid".

⁴⁰Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta Bandung 2013. hlm 07

Penggunaan sumber referensi utama dalam penelitian disebut dengan sumber primer. Penggunaan kitab tafsir *Al-Huda* yang ditulis oleh Brigjen (purn). Drs. H. Bakri Syahid ialah yang menjadi sumber utama dipenelitian ini.

b. Data Sekunder

Perolehan data dari studi kepustakaan berupa buku tentang Al-Dakhil dan Konsep Kenegaraan. Kemudian artikel dan Jurnal ilmiah yang berkaitan dengan Al-Dakhil dan Konsep Kenegaraan dalam Al-Qur'an.

3. Teknik Pengumpulan Data

Studi pustaka atau *Library research* ialah teknik pengumpulan data didalampenelitian ini. Sumberrujukan bersumber dari dokumen tertulis yang berhubungan dengan topik pembahasan penelitian.

4. Metode Penelitian

Deskriptif analisis merupakan metode yang peneliti pilih dalam menyelesaikan penelitian ini, dimana metode ini memaparkan objek yang diteliti menggunakan data yang sudah dikumpulkan. Kemudian data yang telah dikumpulkan dianalisis dan diambil kesimpulannya.

H. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan pembahasan, susunan dari skripsi ini diantaranya:

BAB I. Isi dari bab ini ialah pendahuluan, latar belakang yang menjadi penyebab dilakukannya penelitian ini, permasalahan penelitian, manfaat dan tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka berpikir, metode penelitian, serta sistematika kepenulisan.

BAB II. Isi dari bab ini ialah landasan teori *Al-Dakhil* dan Konsep Kenegaraan berdasarkan para ahli. Pembahasan di dalamnya antara lain, pengertian, sejarah perkembangan, jenis, dan lainnya.

BAB III. berisikan penjelasan mengenai biografi Brigjend (purn) Drs. H. Bakri Syahid sebagai penulis kitab Tafsir *Al-Huda*, juga ditampilkan metodologinya, baik dari metode, corak, sumber, dan lain sebagainya.

BAB IV. pada bab ini, penulis memaparkan penafsiran ayat yang membahas mengenai Konsep Kenegaraan berdasarkan penafsiran Bakri Syahid, kemudian memaparkan implikasi Al-Dakhil *fi al-Ra'yi* dalam ayat-ayat tersebut.

BAB V. Pada bab ini penulis memaparkan simpulan penelitian yang menjawab rumusan masalah penelitian. Bab ini juga memuat saran dan rekomendasi yang diharapkan

penulis dari penelitian ini, kemudian digunakannya rujukan berupa daftar pustaka dalam penelitian ini.

